

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada SKPD Kota Palopo

Nispa Sari¹, Rifqa Ayu Dasila. ✉², Tyara Sari³

^{1,2,3}*Universitas Muhammadiyah Palopo*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern terhadap aksesibilitas pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palopo. Populasi penelitian ini terdiri dari staf sub keuangan, bendahara dan keuangan dan sampel penelitian adalah kuesioner 60. Metode analisis data yang digunakan adalah uji Validitas dan Reggression, uji asumsi klasik yang digunakan, uji normalisasi data, uji kolinearitas dan uji hipotesis parsial. t dan simultan-f . Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan, namun pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kata Kunci: *Akuntabilitas laporan keuangan, pengendalian intern dan Aksesibilitas pengelolaan keuangan*

Copyright (c) 2023 Nispa Sari

✉ Corresponding author :

Email Address : nispa3@gmail.com

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah berkembang pesat di semua sektor salah satunya adalah sektor keuangan. Di dalam sektor keuangan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat di lihat dengan mengetahui seluruh program kerja yang akan di laksanakan, sehingga di tuntut adanya transparansi dalam pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas program kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya. Dalam sektor publik, seluruh kegiatannya yang telah di laksanakan wajib di pertanggungjawabkan agar dapat di ketahui bahwa hasil kegiatan yang telah di laksanakan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Masyarakat yang taat dan patuh pada peraturan pemerintah berhak menuntut pertanggungjawaban dari kinerja pemerintah Negara dan pemerintah Daerah dalam rangka pemberian informasi secara transparan. Seharusnya pemerintah lebih transparan mempertanggungjawabkan secara akuntabilitas (akuntability) seluruh pelaksanaan kegiatan, mengeluarkan kebijakan, tindakan, dan kinerja terhadap pelayanan publik.

Tanggung jawab adalah komitmen sebagai penyelenggara hukum (pemerintah) dalam tanggung jawab. Dalam pertanggungjawaban terhadap laporan

keuangan sektor publik, salah satu prinsip yang harus di penuhi atau di pegang erat oleh setiap organisasi atau instansi ialah akuntabilitas. Pengertian secara umum tentang Akuntabilitas agar dapat di pahami lebih mudah ialah keadaan yang dapat di mintai pertanggung jawaban dalam hal ini yang di khususkan di sektor keuangan serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2009).

Pada prinsip laporan keuangan tentang akuntabilitas yang sudah dijelaskan sebelumnya menuntut adanya aksesibilitas. Aksesibilitas adalah bentuk kemudahan pada seseorang yang ingin mendapat informasi tentang laporan keuangan (Fauziyah, 2017). Seperti yang ditunjukkan oleh pengungkapan laporan keuangan agar dapat dimanfaatkan oleh publik merupakan aspek aksesibilitas (Mustofa, 2012). Sementara itu, masyarakat umum (publik) di Indonesia memiliki keistimewaan dari data moneter yang muncul sebagai hasil dari gagasan tanggung jawab kepada masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) Pasal 9 ayat 4 Tahun 2008 untuk mendistribusikan informasi publik secara teratur dengan cara yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat umum (Hehanuss, 2015).

Selama ini pemerintah pusat dan daerah memberikan hak publik atau masyarakat untuk mengakses laporan keuangan pemerintah. Untuk menentukan tingkat akuntabilitas keuangan suatu daerah, pelaporan keuangan kepada pemangku kepentingan harus mencakup kriteria untuk menerapkan aksesibilitas atau memberikan kemudahan. Sejak di berlakukannya peraturan otonomi daerah dan desentralisasi fisik, salah satu tujuan pelaksanaannya adalah mewujudkan good governance atau system pemerintah yang baik yang di tandai dengan transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi publik, dan efisiensi kegiatan. Akibatnya, isu-isu yang muncul ketika akuntabilitas publik di implementasikan menjadi sangat signifikan dan efisien, serta penegakan peraturan. Pemerintah mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan, jujur, atau dapat di andalkan. Kepada publik melalui modifikasi penyajian laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan amanat dari publik guna mewujudkan semua hal tersebut (Mulyana, 2006).

Pengertian umum laporan anggaran daerah adalah gambaran yang terorganisir tentang posisi-posisi di bidang moneter dengan hasil bahwa pertukaran tuan rumah dilakukan sebagai pertemuan yang dapat mengawasi asset publik, serta memiliki pilihan untuk memberikan tanggung jawab. Transparansi dalam penyajian informasi dalam laporan keuangan di perlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan aksesibilitas di sector pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kenyataannya, laporan keuangan yang di keluarkan pemerintah saat ini masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan komponen terpenting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, khususnya di daerah (LKPD). Menurut pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010, SAP adalah prinsip akuntansi yang di gunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam upaya membuat laporan keuangan pemerintah di Indonesia lebih akuntabel, dapat ditarik kesimpulan bahwa SAP merupakan persyaratan hukum yang harus di patuhi. Perlu di ketahui bahwa beberapa pihak mendasarkan keputusannya pada laporan keuangan yang telah di susun sebagai sumber informasi keuangan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pada laporan keuangan yang akan segera di gunakan sebagai tempat akuntabilitas pada laporan keuangan yang akan di gunakan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi pengguna atau stakeholder yang nantinya dapat di publikasikan dapat di sajikan secara valid dan andal bagi para pihak yang membutuhkannya. Jika laporan keuangan yang di terbitkan buruk, hal ini menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak di susun sesuai dengan standar penyusunan laporan, tidak di sajikan secara tepat, dan akan berdampak negatif bagi pengguna laporan keuangan. (Mahmudi, 2010)

Pelaporan keuangan pemerintah yang akan di hasilkan harus menerapkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang di revisi dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua, yang kemudian mengeluarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang mewajibkan pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 memberikan penjelasan mengenai pengguna laporan keuangan yang meliputi masyarakat umum, wakil rakyat, lembaga pengawas dan pemeriksa, pihak yang memberi atau ikut serta dalam proses sumbangan, penanaman modal, pinjaman, dan pemerintah. Untuk memenuhi perannya sebagai sumber informasi keuangan, laporan keuangan tidak dapat di sajikan karena masalah akses dan kurangnya informasi yang di perlukan laporan tahunan.

Tingkat keberhasilan system pengendalian intern dapat di ukur dari *Good Government Governance* (GGG) yang baik, yang tercermin dalam laporan kinerja pemerintahan di tuangkan dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, yang nantinya akan di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta di lanjutkan dengan keluarnya opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas, di tetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PP No. 12 Tahun 2019, yaitu : keandalan, relevan, dapat di pertimbangkan, dan dapat di pahami. Pemenuhan terhadap karakteristi tersebut, sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban bahwa pemerintah telah mengelola dana publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang di tetapkan(Mahmudi, Akuntansi sektor publik, 2016)

Banyak penelitian terdahulu yang telah mengkaji mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan seperti,(Arumanti, 2018) Analisis regresi berganda menunjukkan bahwa aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan analisis regresi moderat, pengendalian internal dapat membatasi akses akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. dan internal. (Nurlaili, 2016) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat secara signifikan ketika penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas. (Nur Azizah, 2015) Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pada penelitian terdahulu ada perbedaan antara penelitian(Nurlaili, 2016) dan (Nur Azizah, 2015) yaitu mengenai Aksesibilitas laporan keuangan yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

apakah berpengaruh positif atau negatif sehingga peneliti ingin meneliti serta menganalisa lebih lanjut tentang kejadian tersebut.

Akuntabilitas

Akuntabilitas laporan keuangan sama dengan akuntabilitas integritas keuangan, akuntabilitas pengungkapan, dan akuntabilitas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan di Instansi pemerintah merupakan item yang akan di cantumkan dalam laporan keuangan. Sistem penganggaran pemerintah yang dapat di akses secara berkala, laporan keuangan tahunan, dan temuan investigasi atas laporan publik lainnya yang di susun oleh pihak indenpenden merupakan sarana utama untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Menurut Mardiasmo (2018), pemegang amanah berkewajiban untuk menyajikan dan melaporkan semua kegiatannya kepada wali amanat, yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban. Melaksanakan informasi untuk menjunjung tinggi hak-hak publik antara lain, yaitu hak untuk di beritahu (right to be information) dan hak untuk di dengarkan aspirasinya (right to be hearing). Selain itu, kegunaan laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk deklarasi yang di buat oleh manajemen pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan.

Ruang lingkup akuntansi sektor publik

Peran organisasi pada sektor publik (pemerintah) dan usaha yang telah terbukti sebagai tulang punggung perekonomian. Pembahasan ini tidak dapat dibatasi karena akan menimbulkan ketiadaan pengaturan pada praktiknya. Langkah awal untuk menata kembali akuntansi sektor publik dan harus dilakukan karena sangat substansial sebagai kesepakatan bersama.

Di Indonesia, ruang lingkup organisasi pada sektor publik meliputi lembaga tinggi Negara, kementerian, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, seta organisasi publik nirlaba. Ada beberapa Akuntansi Sektor Publik di Indonesia yakni: a) Akuntansi Pemerintah Pusat; b) Akuntansi Pemerintah; c) Akuntansi Pertanahan; d) Akuntansi Tempat Peribadatan (Masjid, Gereja, dsb); e) Akuntansi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM); f) Akuntansi Yayasan; g) Akuntansi Pendidikan seperti Sekolah dan Perguruan Tinggi; serta h) Akuntansi Kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit.

Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik

a. Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik

SAP No. mengatur tentang penyajian laporan keuangan pemerintah yang mengatur tentang bagaimana laporan keuangan disajikan untuk umum guna memudahkan dalam membandingkan laporan keuangan antar entitas, anggaran, dan periode. Pada umumnya bagian keuangan menyusun dan menggunakan keuangan laporan untuk menilai jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi jangka panjang, sehingga memainkan peran prediktif dan prospektif.

b. Peran dan tujuan laporan keuangan sektor publik

Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan yang bersangkutan atas transaksi-transaksi pada periode tertentu pada waktu yang bersamaan sehingga anggaran yang ditetapkan dapat dibandingkan dengan realisasi pendapatan dan belanja. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi organisasi, serta kepatuhan terhadap peraturan. Tujuan laporan keuangan, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 dan Mahmudi (2011), adalah untuk menyediakan sektor publik informasi keuangan untuk penggunaan umum untuk: 1) Menyediakan informasi yang dapat dipertimbangkan saat membuat keputusan; 2) Akuntabilitas dan transparansi; dan 3) Menyediakan data untuk evaluasi kinerja manajer dan organisasi.

Dalam penilaian akuntabilitas dan pengambilan keputusan, laporan keuangan dari pemerintah daerah wajib memberikan informasi berupa laporan yang berfungsi untuk memberikan: 1) Cukup menutup biaya dengan informasi pendapatan saat ini; 2) Data perolehan aset keuangan juga memberikan dan menyesuaikan dengan pedoman material; 3) Informasi tentang berapa banyak uang yang dapat dikeluarkan dan hasil apa yang dapat diharapkan; 4) Informasi tentang bagaimana pemerintah daerah membiayai semua kegiatan dan kas yang cukup untuk menutup pengeluaran; 5) Sumber pendapatan jangka pendek atau jangka panjang, seperti pinjaman dan pungutan pajak daerah, menjadi fokus informasi tentang keuangan pemerintah daerah; dan 6) Informasi tentang perubahan situasi keuangan seseorang, seperti peningkatan atau penurunan yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan.

Pengendalian Internal

Commitee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commisions, 2013 mendefinisikan Pengendalian internal sebagai proses yang dirancang dan dipengaruhi oleh dewan entitas direktur, manajemen, dan personal lainnya. Di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dituntut lebih akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaan roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran atau kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu (Angraini, 2016)

Mahmudi (2016) mengatakan terdapat beberapa rangka model pengembangan pengendalian internal yaitu : Pada tahun 1992 COSO mengeluarkan model pengendalian internal yang terdiri dari lima komponen, yaitu : 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Kegiatan Pengendalian; 3) Penilaian Risiko; 4) Informasi dan Komunikasi; dan 5) Pemantauan Pengendalian Intern.

Aksesibilitas

Menurut peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2010, pemerintah daerah diperbolehkan memberikan akses seluas-luasnya terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh media cetak dan elektronik.

Makna keterbukaan menurut sudut pandang spasial adalah aksesibilitas suatu asosiasi yang dimulai dari satu titik kemudian ke titik berikutnya untuk kenyamanan

individu atau kendaraan untuk bergerak mulai dari satu titik kemudian ke titik berikutnya. Mulyana (2006) menyatakan bahwa kegiatan aksesibilitas memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan yang bermanfaat melalui akses publik yang dapat dibaca dan dipahami.

Masyarakat sebagai pihak yang mempercayai pemerintah untuk mengelola keuangannya berhak menerima data keuangan dari pemerintah untuk evaluasi kinerja. Kewajiban pemerintah kepada masyarakat sebagai wali amanat atau wali mengakibatkan hak publik atas informasi keuangan. Organisasi publik wajib menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan memberikan informasi dan bukti.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas aksesibilitasnya kepada publik. Media sosial dan elektronik seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet, antara lain, dapat mendukung mengakses dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Menurut Shende dan Bennet (2004) dan Mulyana (2006), perumus dan pelaksana kebijakan APBN harus transparan dan akuntabel terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada publik..

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004, dan informasi yang diberikan dapat melaksanakan akuntabilitas melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi tersebut untuk memicu good governance-yaitu pemerintahan yang bersih, transparan dan dapat merespon perubahan dengan lebih efektif. Kemajuan teknologi saat ini memiliki potensi yang luas. No. Permendagri 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemangku kepentingan harus memiliki akses terhadap laporan keuangan daerah dari pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau sarana lainnya.

Informasi tambahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan akses terbuka kepada pemangku kepentingan antara lain sebagai berikut: 1) Sifat transparansi laporan keuangan yang akan datang dari pemerintah daerah; 2) Kemudahan akses informasi laporan keuangan daerah; dan 3) Accessible artinya laporan keuangan pemerintah daerah dapat diakses secara online oleh masyarakat luas.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif., dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Penelitian kuantitatif menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian di lakukan.

a. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam bagian akuntansi pada SKPD kota palopo sebanyak 3 kantor. Setiap kantor diwakili 3 bagian

sub keuangan, bendahara dan staff keuangan, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 orang dari seluruh bagian keuangan SKPD Kota Palopo.

b. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pernyataan kepada responden yang fungsinya adalah menggali informasi. Kuesioner yang di distribusikan ke masing-masing 3 kantor SKPD Kota Palopo sebanyak 20 rangkap, sehingga jumlah kuesioner yang di sebarakan sebanyak 60 kuesioner. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang di sebarakan kepada sejumlah responden yang terdiri dari variabel Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan (X1) dengan 6 pernyataan, variabel Pengendalian intern (X2) dengan 13 pernyataan, sedangkan variabel Akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) dengan 9 pernyataan. Setelah data di peroleh, selanjutnya peneliti mentabulasikan jawaban-jawaban yang ada. Pada tahap awal pembagian kuesioner ada pemberian kode untuk setiap jawaban yang di berikan responden. Kode yang di berikan untuk jawaban responden yaitu sangat setuju (ss), setuju (s), netral (n), tidak setuju (ts) dan sangat tidak setuju (sts).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Statistik

1. Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS nilai validitas dapat dilihat pada kolom *corrected item total correlation*.

Tabel 1. Hasil uji validitas

	Instrumen	r hitung	r tabel	keterangan
Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan (X1)	Pernyataan X1	0,740	0,254	Valid
	Pernyataan X2	0,724	0,254	Valid
	Pernyataan X3	0,744	0,254	Valid
	Pernyataan X4	0,739	0,254	Valid
	Pernyataan X5	0,638	0,254	Valid
	Pernyataan X6	0,786	0,254	Valid
Pengendalian Intern (X2)	Pernyataan X1	0,805	0,254	Valid
	Pernyataan X2	0,895	0,254	Valid
	Pernyataan X3	0,908	0,254	Valid
	Pernyataan X4	0,895	0,254	Valid
	Pernyataan X5	0,875	0,254	Valid
	Pernyataan X6	0,855	0,254	Valid
	Pernyataan X7	0,894	0,254	Valid
	Pernyataan X8	0,674	0,254	Valid
	Pernyataan X9	0,547	0,254	Valid
	Pernyataan X10	0,827	0,254	Valid
	Pernyataan X11	0,905	0,254	Valid
	Pernyataan X12	0,899	0,254	Valid
	Pernyataan X13	0,895	0,254	Valid
	Pernyataan Y1	0,873	0,254	Valid

Akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y)	Pernyataan Y2	0,881	0,254	Valid
	Pernyataan Y3	0,883	0,254	Valid
	Pernyataan Y4	0,913	0,254	Valid
	Pernyataan Y5	0,936	0,254	Valid
	Pernyataan Y6	0,879	0,254	Valid
	Pernyataan Y7	0,930	0,254	Valid
	Pernyataan Y8	0,923	0,254	Valid
	Pernyataan Y9	0,923	0,254	Valid

Sumber: Data primer yang diolah di SPSS

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai r tabel adalah 0,254 Item Aksesibilitas laporan keuangan (X1), Pengendalian Intern (X2) dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) menunjukkan bahwa semua item pernyataan dapat di gunakan, karena nilai r hitung jika lebih besar dari r tabel, sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode statistik *Cronback Alpha* dengan signifikansi 0,60 jika pernyataan yang disampaikan dalam pengukuran instrumental cukup reliabilitas. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* kurang dari 0,60 maka pernyataan tersebut tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil uji reliabilitas

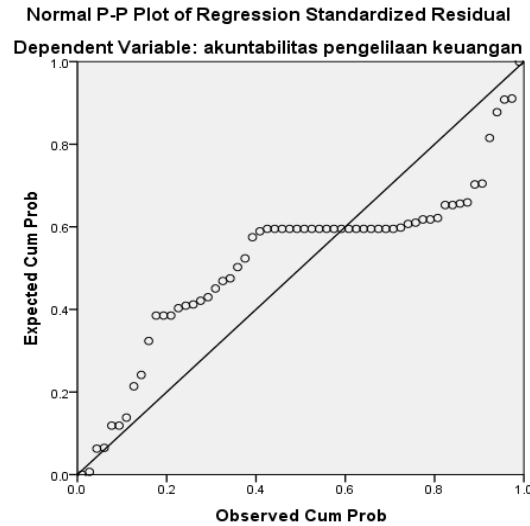
Variabel	Cronbach's Alpha	Batas reabilitas	R tabel	Keterangan
Pengaruh aksesibilias laporan keuangan (X1)	0,781	0,60	0,254	Reliabel
Pengendalian Intern (X2)	0,778	0,60	0,250	Reliabel
Akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y)	0,972	0,60	0,254	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah di SPSS

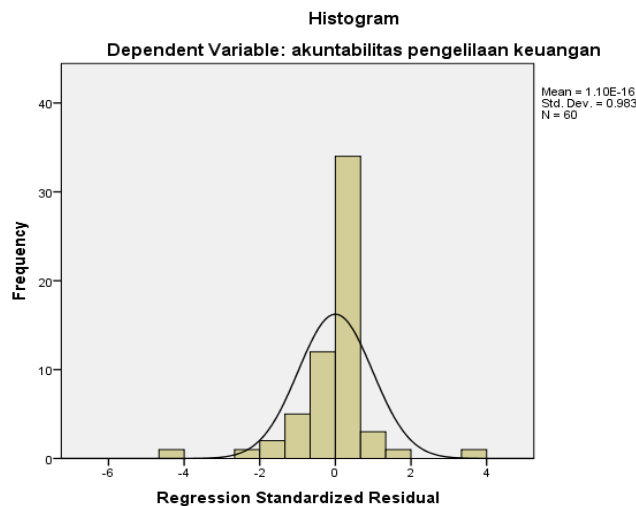
b.Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalistis

Gambar 1. hasil uji normalistis



Gambar 2. Hasil uji histogram



Pada gambar grafik di atas sebaran data (titik) pada sumbu diagonal membentuk garis diagonal sesuai dengan pedoman uji normalitas, hal ini menunjukkan bahwa jika sebaran data (titik) mengikuti atau mendekati garis tersebut maka penelitian dapat dilakukan atau dikatakan normal.

Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini tampak normal, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan metode Colologrov Smimov.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolomogrov-Smimov	
Test Statistic	P-Value
N	60
One-Sample Kolomogrov-Smimov	,716

Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS

Dari hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,716, dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Variabel	Tolerance	VIF
Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan (X1)	0,969	1.032
Pengendalian Intern (X2)	0,969	1.032
Akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y)	0,969	1.032

Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS

Pada Tabel 4 terlihat nilai toleransi sebesar 1.032 untuk variabel bebas. Sedangkan untuk nilai VIF 0,969 berdasarkan pedoman uji multikolinieritas, nilai tolerance lebih dari 0,10, dan untuk nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dilihat bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi.

c. Uji Hipotesis

Uji parsial

Tabel 5. Hasil uji parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.202	5.908		2.573	.013
	pengaruh aksesibilitas laporan keuangan	.088	.207	.048	.427	.671
	pengendalian intern	.391	.084	.526	4.633	.000

sumber: Data Primer yang diolah di SPSS

Pembuktian hasil pengujian hipotesis variabel aksesibilitas laporan keuangan (X1), dapat dilihat bahwa aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai signifikansi $0.671 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan

(X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) sehingga dapat di simpulkan H1 di tolak.

Pembuktian hasil pengujian hipotesis variable pengendalian intern (X2), dapat di lihat bahwa pengendalian intern memiliki nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) sehingga dapat di simpulkan bahwa H2 di terima.

Uji Simultan (Uji-F)

Tabel 6. Hasil uji simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	753.919	2	376.960	11.535	.000 ^b
	Residual	1862.681	57	32.679		
	Total	2616.600	59			

sumber: Data Primer yang diolah di SPSS

- Predictors : (Costant) aksesibilitas laporan keuangan, pengendalian intern.
- Dependent Variabel : akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pengolahan data hasil uji F ditunjukkan pada tabel di atas, dimana nilai signifikan adalah $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti secara simultan menerima H4 bahwa aksesibilitas laporan keuangan (X1) dan pengendalian intern (X2) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) SKPD Kota Palopo

Berdasarkan hasil penelitian maka aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Nilai signifikan sebesar $0,671 > 0,05$, maka hipotesis dalam penelitian ini di tolak. Hasil yang tidak signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan karena diduga pemerintah daerah hanya mempublikasikan informasi terkait laporan keuangan hanya melalui internet, tetapi laporan keuangan tidak dapat di akses seperti di media nir massa contohnya koran, majalah dan televisisehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses laporan keuangan karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mengetahui internet.

Nilai signifikansi variabel pengendalian Intern sebesar $0,00 < 0,05$ menunjukkan bahwa penelitian ini di terima, yang menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh positif terhadap aksesibilitas pengelolaan keuangan. Tujuan penerapan pengendalian intern adalah untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang handal. Tujuan ini didasarkan pada premis utama bahwa informasi penting untuk pengambilan keputusan. Agar dapat mengambil keputusan

yang tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yang disajikan bersifat andal/terpercaya dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jika pelaporan yang disampaikan kurang memadai, maka dapat merugikan organisasi.

Hasil penelitian ini sama dengan dilakukan (Nurlaili, 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, proses aksesibilitas laporan keuangan daerah di katakana dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jika pemerintah daerah mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi laporan keuangan, maka aksesibilitas daerah terhadap laporan keuangan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil pengelolaan data, disebutkan bahwa nilai signifikan Uji-F $(0,000) < 0,05$ dan $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka dapat diartikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palopo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap aksesibilitas pengelolaan keuangan daerah di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palopo. Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian intern yang dilakukan maka tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin meningkat. Penerapan aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini dapat diperoleh dari uji F $(0,000) < 0,005$ dan $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$.

Referensi :

- Angraini, e. a. (2016). Pengaruh penerapan sistem keuangan daerah, transparansi, aktivitas pengendalian dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah . *Mahasiswa Fakultas Ekonomi Riau*, 3(1), 1178-1189.
- Arumanti, N. R. (2018). Aksesibilitas laporan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi Akuntansi, UIN Alauddin*.
- Fauziyah, M. R. (2017). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. *Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah*, 4.
- Hehanuss, S. J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

- keuangan daerah kota ambon. *Conference In Bussiness, Accounting, and Management*, 84.
- Mahmudi. (2010). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. *Ed. II Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta*.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi sektor publik. *Yogyakarta UII Press*.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. *Andi, Yogyakarta*.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta. Andi*.
- Mulyana. (2006). Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal akuntansi pemerintah*.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten pematang. *Accounting Analysis Journal*, 3.
- Nur Azizah, a. e. (2015). Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internanl pemerintah sebagai determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi dan Manajemen*.
- Nurlaili. (2016). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *JOM Fekom*.
- Pengaturan Pemerintah. Penerapan SAP berbasis AkruaI. *No. 71 Tahun 2010*
- Pengaturan Pemerintah. Standar AKuntansi Pemerintah. *No. 17. Tahun 2010*